

Daya Dukung dan Ambang Batas Kunjungan pada Kawasan Pusaka Perkotaan, Menuju Kerangka Ambang Berlapis dengan Pembelajaran dari Yogyakarta dan Bali

Carrying Capacity and Visitation Thresholds in Urban Heritage Areas: Towards a Layered Threshold Framework, with Lessons from Yogyakarta and Bali

Muhammad Rahmad¹, Elyn Hastriana²

¹Institut Pariwisata Trisakti; ²Pusat Kajian Pariwisata dan Ekonomi Indonesia

muhammadrahmad@iptrisakti.ac.id; ehastriana@gmail.com

ABSTRAK

Pembicaraan tentang kunjungan berlebih di kawasan pusaka perkotaan Indonesia hampir selalu berujung pada satu pertanyaan yang sama, yaitu berapa jumlah wisatawan yang sanggup ditampung sebuah kawasan. Artikel ini berargumen bahwa pertanyaan tersebut keliru sejak awal, dan kekeliruannya menjelaskan mengapa kebijakan pengendalian kunjungan di Indonesia sulit menemukan bentuk. Daya dukung sebuah kawasan pusaka perkotaan tidak dapat dinyatakan sebagai satu angka tunggal, karena kawasan semacam ini tidak berpagar, tidak berpintu tunggal, dan bercampur dengan ruang hidup warga serta lalu lintas harian kota. Melalui telaah pustaka integratif dan pembacaan atas dua kawasan yang paling sering dibicarakan di Indonesia, yaitu kawasan Malioboro di Yogyakarta dan kawasan wisata utama di Bali, artikel ini mengusulkan pengalihan pertanyaan dari berapa banyak orang yang boleh datang menjadi keadaan apa yang hendak dipertahankan dan pada titik mana pengelola harus bertindak. Usulan tersebut dituangkan dalam Kerangka Ambang Berlapis yang membedakan tiga jenis ambang, yaitu ambang sistem yang menyangkut air, limbah, dan udara, ambang warga yang menyangkut daya tahan sosial penduduk setempat, dan ambang pengalaman yang menyangkut kenyamanan wisatawan. Artikel ini mengajukan dalil bahwa pada kawasan pusaka perkotaan ambang warga umumnya tercapai jauh lebih dahulu daripada ambang pengalaman, sehingga kebijakan yang hanya memantau kepuasan wisatawan akan selalu terlambat menyadari persoalan. Kerangka tersebut kemudian diturunkan menjadi empat ranah indikator beserta standar, pemicu tindakan, dan tindakan yang menyertainya. Artikel juga membahas kedudukan Tri Hita Karana sebagai landasan normatif dalam menetapkan keadaan yang hendak dijaga, disertai peringatan agar gagasan tersebut tidak berhenti sebagai hiasan dokumen.

Kata kunci: *daya dukung, kunjungan berlebih, kawasan pusaka perkotaan, ambang batas, Tri Hita Karana*

ABSTRACT

Discussion of excessive visitation in Indonesia's urban heritage areas almost invariably ends with the same question, namely how many tourists an area can accommodate. This article argues that the question is misconceived from the outset, and that this misconception explains why visitation management policy in Indonesia struggles to take shape. The carrying capacity of an urban heritage area cannot be expressed as a single figure, because such areas have no

fence, no single gate, and are interwoven with residents' living space and the city's daily traffic. Through an integrative literature review and a reading of the two most frequently discussed Indonesian settings, namely the Malioboro area in Yogyakarta and Bali's principal tourism areas, the article proposes shifting the question from how many people may come to what condition is to be maintained and at what point managers must act. The proposal takes the form of a Layered Threshold Framework distinguishing three types of threshold, namely the system threshold concerning water, waste, and air, the resident threshold concerning the social endurance of the local population, and the experience threshold concerning visitor comfort. The article advances the proposition that in urban heritage areas the resident threshold is generally reached well before the experience threshold, so that policy monitoring visitor satisfaction alone will always be late in recognising the problem. The framework is then translated into four indicator domains with accompanying standards, action triggers, and responses. The article also considers the place of Tri Hita Karana as a normative basis for defining the condition to be maintained, with a caution against the idea remaining merely decorative in policy documents.

Keywords: *carrying capacity, overtourism, urban heritage area, thresholds, Tri Hita Karana*

1. PENDAHULUAN

Setiap kali kawasan pusaka perkotaan di Indonesia dipenuhi pengunjung pada musim liburan, pembicaraan publik bergerak ke arah yang dapat ditebak. Muncul pertanyaan berapa jumlah wisatawan yang sesungguhnya sanggup ditampung kawasan tersebut, disusul seruan agar pemerintah menetapkan pembatasan, dan diakhiri dengan pernyataan bahwa kajian daya dukung perlu segera dilakukan. Rangkaian ini berulang hampir setiap tahun tanpa menghasilkan kebijakan yang benar-benar berjalan.

Artikel ini berpendapat bahwa kebuntuan tersebut bukan disebabkan oleh kurangnya kemauan politik maupun kurangnya anggaran kajian, melainkan oleh bentuk pertanyaannya sendiri. Pertanyaan berapa jumlah maksimal wisatawan mengandaikan bahwa daya dukung merupakan sifat bawaan sebuah kawasan yang dapat ditemukan melalui pengukuran, sebagaimana kapasitas sebuah gedung pertunjukan dapat dihitung dari jumlah kursinya. Pengandaian ini tidak sesuai dengan watak kawasan pusaka perkotaan.

Kawasan pusaka perkotaan memiliki tiga ciri yang membuatnya berbeda dari objek wisata yang berpagar. Pertama, kawasan ini tidak memiliki batas fisik yang tegas dan tidak memiliki pintu masuk tunggal, sehingga jumlah pengunjungnya tidak dapat dihitung dengan cara yang sederhana. Kedua, kawasan ini merupakan ruang hidup warga sekaligus ruang lintas harian penduduk kota, sehingga pengunjung wisata bercampur dengan orang yang bekerja, bersekolah, dan berbelanja di sana. Ketiga, nilai yang hendak dijaga di kawasan ini bukan hanya kondisi fisik bangunan, melainkan juga praktik budaya yang masih berlangsung, yang sifatnya tidak dapat diukur dengan satuan jumlah.

Kritik terhadap gagasan daya dukung sebagai angka tunggal sesungguhnya sudah lama berkembang dalam literatur kepariwisataan. McCool dan Lime (2001) mengajukan pertanyaan yang sangat tajam mengenai apakah daya dukung pariwisata merupakan khayalan yang menggoda atau kenyataan yang berguna, dan menyimpulkan bahwa pencarian angka tunggal cenderung berakhir sia-sia karena jumlah yang dapat diterima selalu bergantung pada keadaan

apa yang ingin dipertahankan. Manning (2007) menegaskan hal serupa dengan menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan pengunjung pada dasarnya merupakan persoalan menetapkan tujuan pengelolaan, bukan persoalan menghitung.

Meskipun demikian, pergeseran cara pandang tersebut belum banyak masuk ke dalam praktik kebijakan di Indonesia. Dokumen perencanaan masih banyak yang mencantumkan angka daya dukung sebagai keluaran kajian, sementara instrumen pengendalian yang diterapkan di lapangan umumnya tidak terhubung dengan angka tersebut. Akibatnya, instrumen berjalan tanpa tolok ukur, dan keberhasilannya sulit dinilai.

Dua kawasan menjadi rujukan yang hampir selalu disebut dalam pembicaraan ini. Yang pertama adalah kawasan Malioboro di Yogyakarta, kawasan pusaka perkotaan yang menjadi tujuan utama wisatawan sekaligus jalur lalu lintas dan ruang usaha bagi ribuan orang. Yang kedua adalah kawasan wisata utama di Bali, yang menghadapi tekanan kunjungan dengan skala dan kerumitan yang berbeda serta telah menerapkan sejumlah instrumen kebijakan, termasuk pungutan bagi wisatawan asing berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini mengajukan tiga pertanyaan. Pertama, mengapa gagasan daya dukung sebagai angka tunggal tidak dapat diterapkan pada kawasan pusaka perkotaan. Kedua, bentuk perumusan seperti apa yang lebih sesuai dengan watak kawasan tersebut. Ketiga, apa implikasinya bagi kebijakan pengendalian kunjungan di Indonesia, dengan memperhatikan pengalaman Yogyakarta dan Bali.

Tujuan artikel ini adalah mengalihkan pertanyaan kebijakan dari jumlah orang menuju keadaan yang hendak dipertahankan, menyusun kerangka ambang yang dapat dipakai untuk itu, dan menurunkannya menjadi indikator yang dapat dipantau. Sumbangan yang diharapkan bersifat konseptual sekaligus praktis, karena selain menawarkan cara pandang, artikel ini juga menyediakan bentuk perumusan yang dapat dipakai pengelola kawasan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Riwayat Singkat Gagasan Daya Dukung

Gagasan daya dukung berasal dari pengelolaan sumber daya alam, terutama dari kajian mengenai jumlah ternak yang dapat ditopang sebuah padang penggembalaan. Gagasan ini kemudian dipinjam ke dalam pengelolaan kawasan lindung dan akhirnya masuk ke dalam kepariwisataan. Dalam perpindahan tersebut, gagasan aslinya mengalami perubahan makna yang penting namun sering tidak disadari.

Pada padang penggembalaan, daya dukung dapat dihitung karena hubungan antara jumlah ternak dan ketersediaan pakan bersifat langsung dan dapat diukur. Pada kawasan wisata, hubungan semacam itu tidak ada. Jumlah pengunjung yang dianggap terlalu banyak sangat bergantung pada apa yang diharapkan orang dari kawasan tersebut. Sebuah alun-alun yang dipenuhi orang dapat dianggap gagal apabila yang diharapkan adalah ketenangan, dan dapat dianggap berhasil apabila yang diharapkan adalah keramaian.

Coccossis dan Mexa (2004) menelusuri kerumitan ini dan menunjukkan bahwa penilaian daya dukung kepariwisataan selalu mengandung unsur pertimbangan nilai, bukan semata perhitungan teknis. McCool dan Lime (2001) melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa pencarian angka daya dukung tunggal cenderung menyesatkan pengelola, karena ia mengalihkan perhatian dari pertanyaan yang sesungguhnya menentukan, yaitu keadaan seperti apa yang ingin dipertahankan.

2.2 Peralihan Menuju Kerangka Batas Perubahan

Sebagai jawaban atas kebuntuan tersebut, berkembang kerangka yang berangkat dari sisi yang berbeda. Kerangka Batas Perubahan yang Dapat Diterima yang dirumuskan Stankey dkk. (1985) tidak menanyakan berapa banyak orang yang boleh datang, melainkan seberapa besar perubahan yang masih dapat diterima pada kondisi yang hendak dijaga. Kerangka ini bekerja melalui rangkaian langkah, yaitu menetapkan kondisi yang diinginkan, memilih indikator yang mewakili kondisi tersebut, menetapkan standar bagi setiap indikator, memantau, lalu bertindak ketika standar terlampaui.

Perbedaan antara kedua cara pandang tersebut sangat mendasar. Pada cara pandang lama, pengelola mencari satu angka lalu menerapkannya. Pada cara pandang baru, pengelola menetapkan janji tentang kondisi kawasan lalu menjaga janji itu melalui pemantauan dan tindakan. Manning (2007) menunjukkan bahwa cara pandang kedua jauh lebih dapat dijalankan, karena ia menghasilkan pekerjaan yang jelas bagi pengelola setiap harinya.

Perlu dicatat bahwa kerangka tersebut lahir dari pengelolaan kawasan alam yang berpagar dan memiliki pengelola tunggal. Penerapannya pada kawasan pusaka perkotaan menuntut penyesuaian yang tidak sedikit, terutama karena kawasan perkotaan memiliki banyak pemilik kepentingan dan tidak memiliki pengelola tunggal yang berwenang penuh.

2.3 Kunjungan Berlebih sebagai Persoalan Hubungan

Perkembangan mutakhir dalam kajian kunjungan berlebih memperkuat pergeseran tersebut. Nilsson (2020) merumuskan kunjungan berlebih bukan sebagai persoalan jumlah, melainkan sebagai persoalan kecepatan pertumbuhan dibanding kemampuan sebuah tempat menyerap perubahan. Rumusan ini penting karena ia memindahkan perhatian dari angka menuju hubungan.

Novy dan Colomb (2021) menunjukkan bahwa penolakan warga terhadap pariwisata di berbagai kota Eropa tidak selalu berhubungan lurus dengan jumlah kunjungan, melainkan dengan rasa kehilangan kendali atas ruang hidup. López-Gay dkk. (2021) memperlihatkan bahwa tekanan yang paling dirasakan warga sering berupa perubahan harga dan perubahan fungsi bangunan, yang keduanya tidak terbaca oleh penghitungan pengunjung.

Pergeseran ini sejalan pula dengan gagasan lama tentang siklus hidup destinasi yang dirumuskan Butler (1980), yang menempatkan stagnasi dan penurunan sebagai tahap yang dapat dihindari melalui peremajaan. Yang menarik dari kerangka tersebut adalah bahwa ia tidak menetapkan jumlah pengunjung sebagai penentu, melainkan hubungan antara pertumbuhan kunjungan dan kemampuan destinasi menyesuaikan diri.

Dalam ranah teknis, upaya menghitung tetap berjalan. Tan (2023) mengembangkan pendekatan optimasi bertujuan jamak untuk menghitung daya dukung lingkungan pariwisata perkotaan secara berkelanjutan. Pendekatan semacam ini berguna, tetapi tetap memerlukan penetapan tujuan lebih dahulu, karena optimasi hanya dapat bekerja apabila diberi tahu apa yang hendak dioptimalkan.

2.4 Kawasan Pusaka Perkotaan sebagai Kasus Khusus

Kawasan pusaka perkotaan memiliki kekhususan yang menuntut perlakuan tersendiri. Al-arab dan Abbawi (2023) menunjukkan bahwa revitalisasi kawasan pusaka menghadirkan ketegangan antara kepentingan pelestarian dan kepentingan pemanfaatan. Hidalgo-Giralt dkk. (2021) mengusulkan keberlanjutan budaya sebagai alat menghadapi kunjungan berlebih, dengan penekanan bahwa yang perlu dijaga bukan hanya benda, melainkan juga makna dan praktiknya.

Rahmad dkk. (2025) mencatat bahwa daya dukung lingkungan dalam konteks pariwisata perkotaan Indonesia perlu dipahami sebagai bagian dari ekosistem kota yang saling terkait, meliputi komponen biotik, abiotik, dan sosial sekaligus. Catatan ini penting karena ia menolak penyempitan daya dukung menjadi urusan jumlah pengunjung semata.

Page dan Duignan (2023) menambahkan bahwa pariwisata perkotaan tetap merupakan ranah riset yang paradoksal, kaya secara empiris namun tipis secara teoritis, dan pengelolaan tekanan kunjungan di kawasan pusaka merupakan salah satu ruang yang paling membutuhkan penajaman.

2.5 Tri Hita Karana sebagai Landasan Normatif

Dalam konteks Bali, pembicaraan tentang daya dukung tidak dapat dilepaskan dari Tri Hita Karana, yaitu gagasan tentang keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam. Rahmad dkk. (2025) menempatkan gagasan ini sebagai perspektif khas yang dapat memperkaya pengembangan pariwisata perkotaan berbasis kearifan setempat.

Bagi artikel ini, nilai gagasan tersebut terletak pada kemampuannya menjawab pertanyaan yang justru paling sulit dijawab kerangka teknis, yaitu keadaan seperti apa yang hendak dipertahankan. Tri Hita Karana menyediakan jawaban yang tidak berhenti pada kenyamanan wisatawan, karena ia menempatkan hubungan dengan sesama dan dengan alam pada kedudukan yang setara.

Meskipun demikian, penggunaan gagasan ini menuntut kehati-hatian. Roth dan Sedana (2015) menunjukkan bahwa Tri Hita Karana telah mengalami perluasan makna dan pemanfaatan politik, sehingga gagasan yang semula berakar pada praktik dapat berubah menjadi label yang dilekatkan pada berbagai kepentingan. Peringatan ini perlu diperhatikan agar gagasan tersebut tidak berhenti sebagai kalimat pembuka dokumen perencanaan tanpa akibat apa pun pada keputusan.

3. METODE

Artikel ini merupakan artikel konseptual yang disusun melalui telaah pustaka integratif sebagaimana dirumuskan Torraco (2005) dan Snyder (2019). Telaah integratif dipilih karena tujuannya bukan memetakan seluruh literatur, melainkan mengkritisi kerangka yang sudah mapan dan menyusun rumusan yang lebih sesuai dengan konteks yang dibahas.

Pustaka yang ditelaah dikelompokkan menjadi tiga rumpun. Rumpun pertama adalah literatur daya dukung dan pengelolaan pengunjung, yang menjadi objek kritik sekaligus sumber kerangka penggantinya. Rumpun kedua adalah literatur kunjungan berlebihan dan pariwisata perkotaan mutakhir. Rumpun ketiga adalah literatur mengenai kawasan pusaka dan mengenai landasan normatif setempat.

Dua kawasan dipakai sebagai bahan pembacaan, yaitu kawasan Malioboro di Yogyakarta dan kawasan wisata utama di Bali. Keduanya dipilih karena mewakili dua bentuk tekanan yang berbeda. Malioboro mewakili tekanan yang terpusat pada ruang yang sempit dan bercampur dengan lalu lintas harian kota. Bali mewakili tekanan yang tersebar pada wilayah luas dengan keterkaitan yang kuat pada sumber daya air dan pada praktik budaya yang masih hidup. Sumber pembacaan berupa publikasi akademis yang dapat ditelusuri, terutama Nugroho dan Putri (2025) untuk Malioboro serta Pramono dkk. (2026) untuk Bali dan Lombok, dilengkapi dokumen kebijakan dan buku rujukan Rahmad dkk. (2025).

Keterbatasan pendekatan ini perlu dinyatakan sejak awal. Artikel ini tidak melakukan pengukuran lapangan, tidak menghitung kepadatan pengunjung, dan tidak mengukur mutu lingkungan pada kedua kawasan. Kasus dipakai dalam fungsi ilustratif, yaitu untuk menunjukkan bahwa persoalan yang dibahas nyata dan untuk memperjelas cara kerja kerangka yang diusulkan. Standar dan angka pemicu yang dicantumkan dalam artikel ini bersifat contoh perumusan, bukan angka yang telah tervalidasi, dan penetapan angka yang sesungguhnya harus dilakukan melalui pengukuran awal pada masing-masing kawasan.

4. HASIL

4.1 Mengapa Angka Tunggal Tidak Bekerja di Kawasan Pusaka Perkotaan

Telaah atas literatur dan atas watak kawasan pusaka perkotaan menghasilkan empat alasan mengapa perumusan daya dukung sebagai angka tunggal tidak dapat dijalankan.

Alasan pertama menyangkut batas. Kawasan pusaka perkotaan tidak berpagar dan memiliki banyak jalan masuk. Angka daya dukung hanya bermakna apabila ada cara membatasi jumlah yang masuk, dan cara itu tidak tersedia tanpa mengubah kawasan menjadi ruang tertutup, yang justru bertentangan dengan sifatnya sebagai ruang kota.

Alasan kedua menyangkut percampuran. Orang yang berada di kawasan pusaka perkotaan tidak seluruhnya wisatawan. Sebagian besar justru warga yang bekerja, berdagang, bersekolah, atau sekedar melintas. Pembatasan jumlah wisatawan tidak menyelesaikan kepadatan apabila kepadatannya berasal dari kegiatan harian kota.

Alasan ketiga menyangkut waktu. Tekanan di kawasan pusaka perkotaan hampir selalu bersifat memuncak pada waktu tertentu, yaitu akhir pekan, hari libur nasional, dan musim liburan sekolah. Angka rata-rata tahunan menyembunyikan puncak tersebut, padahal pada puncak itulah kerusakan terjadi. Kawasan yang aman menurut hitungan tahunan dapat mengalami kelebihan beban berat selama beberapa hari yang justru menentukan.

Alasan keempat menyangkut keragaman kerusakan. Jenis kerusakan di kawasan pusaka tidak beragam. Kerusakan pada saluran air, keausan pada bahan bangunan bersejarah, kemacetan pergerakan, dan keletihan sosial warga memiliki ambang yang berbeda dan tidak tercapai pada waktu yang sama. Satu angka tidak mungkin mewakili keempatnya.

4.2 Tiga Jenis Ambang

Berdasarkan alasan tersebut, artikel ini mengusulkan perbedaan ambang ke dalam tiga jenis yang diukur secara terpisah, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tiga Jenis Ambang pada Kawasan Pusaka Perkotaan

Jenis ambang	Yang terancam	Cara mengenalinya	Sifat kerusakan
Ambang sistem	Air, limbah, udara, dan bahan bangunan bersejarah	Pengukuran teknis atas mutu dan pasokan	Sebagian bersifat menumpuk dan tidak dapat dipulihkan
Ambang warga	Daya tahan sosial penduduk dan pelaku usaha setempat	Survei berkala, keluhan, dan gejala penarikan diri	Bertahap, sering tidak terlihat sampai berubah menjadi penolakan
Ambang pengalaman	Kenyamanan dan kepuasan wisatawan	Survei kepuasan dan ulasan daring	Cepat terlihat namun juga cepat pulih

Sumber: hasil analisis penulis

Dalil utama artikel ini menyangkut hubungan waktu di antara ketiga ambang tersebut. Pada kawasan pusaka perkotaan, ambang warga umumnya tercapai lebih dahulu daripada ambang pengalaman. Alasannya cukup jelas. Wisatawan berada di kawasan tersebut selama beberapa jam dan menganggap keramaian sebagai bagian dari suasana, bahkan kerap menikmatinya. Warga berada di sana sepanjang waktu dan menanggung akibatnya setiap hari, mulai dari kesulitan bergerak, kebisingan, sampah, hingga hilangnya ketenangan.

Akibat praktis dari dalil ini cukup serius. Pemantauan yang hanya bertumpu pada kepuasan wisatawan akan menunjukkan keadaan baik-baik saja justru ketika keadaan sudah memburuk bagi warga. Kebijakan yang bersandar pada pemantauan semacam itu akan selalu terlambat, dan ketika akhirnya bertindak, hubungan dengan warga sudah lebih dahulu rusak.

Ambang sistem memiliki watak yang berbeda lagi. Sebagian kerusakannya bersifat menumpuk dan tidak dapat dipulihkan, misalnya keausan pada bahan bangunan bersejarah dan penurunan muka air tanah. Untuk jenis ini, pemantauan yang bersifat menunggu terlampauinya standar tidak memadai, karena ketika standar terlampaui kerusakannya sudah terjadi. Diperlukan ambang peringatan yang ditetapkan pada tingkat lebih rendah daripada ambang kerusakan.

4.3 Kerangka Ambang Berlapis

Ketiga jenis ambang tersebut kemudian diturunkan menjadi empat ranah indikator beserta perangkat pengelolaannya, sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Perlu ditegaskan bahwa standar dan pemicu yang tercantum merupakan contoh bentuk perumusan, bukan angka yang telah diuji.

Tabel 2. Kerangka Ambang Berlapis untuk Kawasan Pusaka Perkotaan

Ranah	Contoh indikator	Bentuk standar	Pemicu tindakan	Contoh tindakan
Fisik dan ekologis	Pasokan dan muka air tanah, volume sampah harian, mutu udara, laju keausan bahan bangunan	Batas yang tidak boleh dilampaui pada masing-masing indikator	Tercapainya ambang peringatan yang ditetapkan di bawah ambang kerusakan	Pembatasan kegiatan berair, penambahan siklus pengangkutan sampah, pemagaran sementara pada bagian bangunan yang aus
Ruang dan perilaku	Kepadatan orang per satuan luas pada jam puncak, kecepatan berjalan kaki, panjang antrean, waktu tempuh kendaraan	Kepadatan puncak yang masih memungkinkan orang berjalan dengan wajar	Terlampauinya kepadatan puncak pada sejumlah hari tertentu dalam sebulan	Pengaturan arah arus, penyebaran waktu kegiatan, pemindahan titik parkir, penambahan jalur pejalan kaki
Sosial dan kewargaan	Tingkat dukungan warga, jumlah dan jenis keluhan, tingkat kehadiran warga dalam kegiatan bersama, perubahan komposisi penghuni	Tingkat dukungan warga yang harus dipertahankan	Penurunan dukungan warga selama dua kali pengukuran berturut-turut	Pemulihan saluran keberatan, penyesuaian jam kegiatan, penataan ulang bagi hasil manfaat
Budaya dan praktik	Kelangsungan ritual dan praktik pusaka, jumlah pelaku aktif, perubahan waktu dan tempat pelaksanaan praktik karena kepentingan wisata	Praktik tetap berlangsung menurut waktu dan tempat aslinya	Terjadinya penyesuaian praktik demi kepentingan kunjungan	Penetapan waktu tertutup bagi kunjungan, pengaturan jarak pengamatan, penguatan kaderisasi pelaku

Sumber: hasil analisis penulis, dikembangkan dari kerangka Stankey dkk. (1985) dan McCool dan Lime (2001)

Kerangka ini memiliki tiga ciri yang membedakannya dari praktik yang berlaku. Ciri pertama, ia tidak menghasilkan satu angka, melainkan seperangkat janji tentang kondisi yang akan dipertahankan. Ciri kedua, ia menetapkan pemicu tindakan sejak awal, sehingga pengelola tidak perlu berdebat mengenai kapan harus bertindak ketika keadaan sudah memburuk. Ciri ketiga, ia menempatkan ranah sosial dan ranah budaya sejajar dengan ranah fisik, bukan sebagai pertimbangan tambahan.

4.4 Pembacaan atas Kawasan Malioboro

Kawasan Malioboro memberikan gambaran yang baik mengenai bekerjanya ranah ruang dan perilaku. Nugroho dan Putri (2025) mengkaji strategi pengembangan pariwisata hijau pada kawasan tersebut dengan memusatkan perhatian pada penataan pergerakan. Kajian mereka menyimulasikan pemindahan tiga titik parkir bus wisata ke luar kawasan menuju terminal di

pinggiran kota, disertai pemaduan angkutan listrik dengan moda setempat. Hasil simulasi menunjukkan penurunan volume kendaraan pada ruas jalan di kawasan kajian rata-rata sebesar dua puluh delapan persen dan pada persimpangan sebesar lima belas persen, disertai penurunan emisi karbon monoksida kendaraan rata-rata sebesar dua puluh lima persen.

Yang menarik dari kajian tersebut bukan sekedar angkanya, melainkan pendekatannya. Kajian itu tidak menanyakan berapa jumlah wisatawan yang boleh berada di Malioboro. Ia menanyakan bagaimana pergerakan dapat ditata agar beban berkurang. Dengan kata lain, ia bekerja pada ranah ruang dan perilaku, bukan pada ranah jumlah pengunjung. Hasilnya pun berupa tindakan yang dapat dijalankan, bukan berupa angka yang sulit ditegakkan.

Pembacaan ini menunjukkan bahwa penataan Malioboro sesungguhnya sudah bergerak pada arah yang sejalan dengan kerangka yang diusulkan artikel ini, meskipun bahasanya berbeda. Yang belum tampak adalah penetapan standar dan pemicu secara tertulis, sehingga tindakan yang dilakukan cenderung bersifat menanggapi keadaan daripada bersifat terjadwal berdasarkan indikator.

Yang juga belum tampak adalah pemantauan pada ranah sosial dan kewargaan. Kawasan Malioboro merupakan ruang penghidupan bagi banyak pedagang, penarik becak, dan pekerja informal lain, yang daya tahannya terhadap perubahan penataan tidak selalu sama dengan daya tahan warga pada umumnya. Penataan yang berhasil menurut ukuran lalu lintas dapat sekaligus menggeser penghidupan sebagian kelompok, dan pergeseran itu tidak akan terbaca oleh indikator kendaraan maupun indikator emisi.

4.5 Pembacaan atas Bali

Bali memberikan gambaran yang berbeda dan lebih rumit. Pramono dkk. (2026) meneliti kunjungan berlebih di Bali dan Lombok melalui wawancara, diskusi kelompok, dan pengamatan lapangan, dan menyimpulkan bahwa persoalannya berakar pada kegagalan tata kelola yang bersifat sistemik, bukan pada jumlah pengunjung semata. Mereka mengidentifikasi tiga wujud persoalannya, yaitu kerusakan lingkungan, komodifikasi budaya, dan kebocoran ekonomi yang menyisihkan penduduk setempat. Akar penyebab yang mereka tunjuk meliputi kebijakan yang terpecah, penegakan yang lemah, serta tersingkirnya komunitas setempat dari proses perencanaan. Yang penting bagi artikel ini, mereka justru tidak menganjurkan kuota sebagai jalan keluar utama, melainkan penataan ulang tata kelola yang disertai penetapan batas daya dukung yang tegas, penguatan pariwisata berbasis komunitas, dan penyebaran kunjungan melalui perangkat digital.

Kesimpulan tersebut sejalan dengan dalil artikel ini. Kuota merupakan instrumen, dan instrumen hanya bermakna apabila ada kondisi yang hendak dijaga serta ada pihak yang berwenang menjaganya.

Pengalaman kebijakan Bali memperjelas hal ini. Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan pungutan bagi wisatawan asing melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023, dan penerimaan dari pungutan tersebut terus berjalan meskipun realisasinya masih jauh di bawah sasaran tahunan. Laporan pemberitaan mencatat bahwa hingga pertengahan Mei 2026 penerimaan pungutan mencapai sekitar seratus empat belas miliar rupiah dari sasaran lima ratus miliar rupiah sepanjang tahun tersebut.

Bagi artikel ini, angka tersebut menarik bukan sebagai ukuran keberhasilan penerimaan, melainkan sebagai penanda persoalan perumusan. Sebuah instrumen pungutan dapat dinilai dari dua sisi yang berbeda. Sisi pertama adalah sisi penerimaan, yaitu berapa dana yang terkumpul. Sisi kedua adalah sisi tujuan, yaitu perubahan kondisi apa yang hendak dicapai melalui pungutan tersebut. Selama tujuan pada sisi kedua belum dirumuskan dalam bentuk indikator dan standar, penilaian atas instrumen tersebut akan selalu jatuh pada sisi pertama, dan pertanyaan mengenai apakah kondisi kawasan membaik tidak akan pernah terjawab.

Ranah yang paling menuntut perhatian di Bali adalah ranah fisik dan ekologis, khususnya air. Ketersediaan air merupakan contoh terbaik dari ambang sistem, karena kerusakannya bersifat menumpuk dan pemulihannya berlangsung sangat lambat. Ranah budaya dan praktik juga sangat menonjol di Bali, karena banyak praktik keagamaan berlangsung di ruang yang sama dengan ruang kunjungan wisata. Di sinilah Tri Hita Karana dapat berfungsi sebagai landasan penetapan kondisi yang hendak dijaga, sepanjang ia diterjemahkan menjadi indikator dan bukan berhenti sebagai kalimat pengantar. Roth dan Sedana (2015) mengingatkan bahwa gagasan tersebut dapat mengalami pergeseran makna ketika dipakai sebagai label, sehingga penerjemahan menjadi indikator justru merupakan cara menjaganya tetap bermakna.

4.6 Perbedaan Bentuk Tekanan pada Kedua Kawasan

Pembacaan atas kedua kawasan menunjukkan bahwa bentuk tekanan keduanya berbeda, sehingga ranah yang paling mendesak untuk dipantau pun berbeda.

Pada Malioboro, tekanan bersifat terpusat pada ruang sempit dan memuncak pada waktu tertentu. Ranah yang paling mendesak adalah ruang dan perilaku, disusul ranah sosial dan kewargaan yang menyangkut penghidupan pelaku usaha kecil di kawasan tersebut. Ambang sistem yang paling relevan menyangkut sampah dan mutu udara.

Pada kawasan wisata Bali, tekanan bersifat menyebar pada wilayah luas dan berlangsung sepanjang tahun dengan puncak musiman. Ranah yang paling mendesak adalah fisik dan ekologis, khususnya air dan limbah, disusul ranah budaya dan praktik. Ambang warga di Bali memiliki bentuk yang khas karena ia berkaitan erat dengan kelembagaan adat, yang memiliki cara tersendiri dalam menyatakan keberatan dan dalam mengatur ruang.

Perbedaan ini menegaskan bahwa kerangka yang diusulkan tidak dimaksudkan menghasilkan standar nasional yang seragam. Yang diusulkan seragam adalah cara menyusunnya, sedangkan isinya harus disusun kawasan demi kawasan.

4.7 Perangkat Pengumpulan Data yang Masuk Akal

Keberatan yang paling sering muncul terhadap kerangka semacam ini adalah bahwa pemantauan berlapis menuntut biaya dan tenaga yang tidak dimiliki pengelola kawasan. Keberatan tersebut wajar dan perlu dijawab, karena kerangka yang tidak dapat dijalankan tidak lebih berguna daripada angka daya dukung yang tidak dapat ditegakkan.

Pada ranah fisik dan ekologis, sebagian besar data sesungguhnya sudah dikumpulkan pihak lain untuk keperluan yang berbeda. Data pengambilan air, volume sampah terangkut, dan mutu udara umumnya tersedia pada instansi teknis maupun pada penyedia layanan. Pekerjaan yang

dibutuhkan bukan pengumpulan baru, melainkan penyatuan dan penetapan ambang. Untuk keausan bahan bangunan bersejarah, pemantauan dapat dilakukan melalui pemotretan berkala pada titik yang sama, yang biayanya sangat rendah namun cukup untuk menangkap perubahan lintas tahun.

Pada ranah ruang dan perilaku, penghitungan menyeluruh tidak diperlukan. Yang dibutuhkan adalah penghitungan pada sejumlah titik tetap dan pada waktu yang tetap, misalnya pada tiga titik penampang jalur pejalan kaki selama beberapa hari puncak dan beberapa hari biasa setiap tahun. Kepadatan pada jam puncak dapat diperkirakan dari penghitungan tersebut, dan kecepatan berjalan kaki dapat diukur dengan cara yang sangat sederhana. Data pergerakan kendaraan umumnya sudah tersedia pada instansi perhubungan.

Pada ranah sosial dan kewargaan, cara yang paling dapat dijalankan adalah panel warga, yaitu kelompok warga tetap yang disurvei dua kali setahun dengan pertanyaan yang sama. Panel semacam ini jauh lebih murah daripada survei berskala besar dan justru lebih peka terhadap perubahan, karena yang dilihat adalah pergeseran jawaban pada orang yang sama. Selain itu, catatan keluhan yang masuk melalui saluran resmi dapat dipakai sebagai penanda tambahan, sepanjang salurannya memang berfungsi.

Pada ranah budaya dan praktik, indikatornya justru paling murah dikumpulkan karena berupa pencatatan. Jumlah pelaksanaan ritual, jumlah pelaku aktif, serta ada tidaknya penyesuaian waktu dan tempat pelaksanaan demi kepentingan kunjungan dapat dicatat oleh lembaga adat maupun kelompok masyarakat yang bersangkutan, dan pencatatan itu sekaligus memperkuat kedudukan mereka dalam pengelolaan kawasan.

Dengan susunan seperti ini, pemantauan berlapis tidak menuntut sistem yang mahal. Yang dituntut adalah keteraturan dan kesediaan berbagi data antarinstansi. Keduanya merupakan persoalan kelembagaan, bukan persoalan teknologi.

5. PEMBAHASAN

5.1 Mengapa Kuota Sering Gagal dan Kapan Ia Berguna

Instrumen yang paling sering diusulkan dalam pembicaraan publik adalah kuota kunjungan. Artikel ini berpendapat bahwa kuota bukan instrumen yang buruk, tetapi ia sering diterapkan pada keadaan yang tidak cocok baginya.

Kuota bekerja baik pada tiga syarat. Syarat pertama, kawasan memiliki batas yang jelas dan pintu masuk yang dapat diawasi. Syarat kedua, pengunjung dapat dibedakan dari bukan pengunjung. Syarat ketiga, tersedia pilihan lain bagi orang yang tidak memperoleh kuota, sehingga pembatasan tidak sekedar memindahkan persoalan.

Kawasan pusaka perkotaan umumnya tidak memenuhi syarat pertama dan kedua. Karena itu, penerapan kuota pada kawasan semacam ini cenderung berubah menjadi pembatasan yang hanya berlaku pada titik tertentu, sementara kepadatan berpindah ke ruang di sekitarnya. Yang lebih sesuai bagi kawasan perkotaan adalah instrumen yang bekerja pada pola waktu dan pola ruang, misalnya penyebaran waktu kegiatan, pengaturan arah arus, pemindahan titik henti kendaraan, serta perbedaan tarif menurut waktu.

Kuota tetap berguna pada bagian tertentu di dalam kawasan yang memang berpagar dan berpintu, misalnya bangunan bersejarah tertentu, museum, atau ruang yang sedang dipulihkan. Pada tempat semacam itu, kuota dapat ditegakkan dan akibatnya dapat diukur.

5.2 Menerjemahkan Nilai Menjadi Indikator

Persoalan yang paling sering muncul ketika kerangka semacam ini diusulkan adalah pertanyaan tentang siapa yang berhak menetapkan kondisi yang hendak dijaga. Pertanyaan ini sah dan tidak dapat dijawab secara teknis, karena penetapan kondisi merupakan keputusan nilai.

Di sinilah landasan normatif setempat memperoleh perannya. Tri Hita Karana, misalnya, menetapkan bahwa hubungan dengan alam dan hubungan dengan sesama berada pada kedudukan yang setara dengan kepentingan lain. Apabila landasan ini dipakai, maka kondisi yang hendak dijaga tidak dapat dirumuskan hanya dari sudut kenyamanan wisatawan maupun hanya dari sudut penerimaan daerah.

Namun penerjemahan tetap dibutuhkan. Sebuah nilai baru dapat menjaga sesuatu apabila ia diubah menjadi pernyataan yang dapat diperiksa. Pernyataan bahwa hubungan dengan alam harus dijaga menjadi dapat diperiksa ketika ia diterjemahkan, misalnya, menjadi pernyataan bahwa pengambilan air tanah di kawasan tertentu tidak boleh melampaui tingkat pengisian ulangnya. Tanpa penerjemahan semacam itu, nilai tersebut tetap benar tetapi tidak mengikat siapa pun.

Peringatan Roth dan Sedana (2015) menjadi relevan di sini. Ketika sebuah gagasan budaya dipakai sebagai label tanpa akibat pada keputusan, ia justru dapat menutupi persoalan yang sedang berlangsung, karena kehadirannya dalam dokumen memberi kesan bahwa persoalan sudah ditangani.

5.3 Implikasi bagi Kebijakan

Dari analisis tersebut dapat diturunkan lima implikasi kebijakan.

Implikasi pertama menyangkut bentuk keluaran kajian daya dukung. Kajian daya dukung kawasan pusaka perkotaan sebaiknya tidak lagi diminta menghasilkan satu angka jumlah pengunjung. Yang lebih berguna adalah keluaran berupa daftar indikator, standar, pemicu tindakan, dan tindakan yang telah disepakati, karena keluaran semacam ini dapat langsung dipakai bekerja.

Implikasi kedua menyangkut pemantauan warga. Pemantauan tingkat dukungan warga perlu dilakukan secara berkala dengan alat ukur yang sama dari waktu ke waktu, sehingga perubahannya dapat terbaca. Mengingat ambang warga umumnya tercapai lebih dahulu, pemantauan ini merupakan peringatan dini yang paling berharga sekaligus yang paling sering diabaikan.

Implikasi ketiga menyangkut penetapan ambang peringatan. Untuk indikator yang kerusakannya menumpuk dan sulit dipulihkan, terutama air dan bahan bangunan bersejarah,

perlu ditetapkan ambang peringatan pada tingkat yang lebih rendah daripada ambang kerusakan, disertai tindakan yang wajib dijalankan ketika ambang peringatan tercapai.

Implikasi keempat menyangkut penilaian instrumen ekonomi. Instrumen seperti pungutan dan tarif sebaiknya dinilai tidak hanya dari besarnya penerimaan, melainkan juga dari perubahan kondisi yang hendak dicapainya. Untuk itu, setiap instrumen perlu dikaitkan sejak awal dengan indikator tertentu, sehingga pertanyaan mengenai keberhasilannya dapat dijawab dengan data.

Implikasi kelima menyangkut kelembagaan. Kerangka ini menuntut adanya pihak yang berwenang menyatakan bahwa ambang telah terlampaui dan berwenang menjalankan tindakan yang telah disepakati. Tanpa kejelasan kewenangan, pemantauan akan menghasilkan laporan tanpa akibat. Temuan Pramono dkk. (2026) mengenai kegagalan tata kelola yang bersifat sistemik menunjukkan bahwa persoalan kewenangan inilah yang justru paling menentukan.

5.4 Sumbangan Teoritis dan Batas Keberlakuan

Sumbangan teoritis artikel ini terletak pada tiga hal. Pertama, artikel ini memindahkan kerangka batas perubahan dari konteks kawasan alam berpagar menuju konteks kawasan pusaka perkotaan yang terbuka dan berpemilik kepentingan banyak, dengan penyesuaian pada ranah sosial dan ranah budaya. Kedua, artikel ini mengajukan pembedaan tiga jenis ambang beserta dalil mengenai urutan tercapainya, yang dapat diuji secara empiris. Ketiga, artikel ini menempatkan landasan normatif setempat sebagai bagian dari kerangka teknis, bukan sebagai pelengkap yang berdiri di luarnya.

Batas keberlakuan kerangka ini perlu dinyatakan pula. Batas pertama menyangkut sifat kasusnya. Pembacaan atas Malioboro dan Bali dalam artikel ini bersandar pada sumber sekunder yang berbeda fokus, sehingga ia tidak dapat diperlakukan sebagai perbandingan setara maupun sebagai penilaian atas keadaan kedua kawasan.

Batas kedua menyangkut angka. Seluruh standar dan pemicu yang dicantumkan merupakan contoh bentuk perumusan. Penetapan angka yang sesungguhnya menuntut pengukuran awal, pembahasan bersama pemangku kepentingan, dan kesediaan menerima bahwa angka tersebut mengandung pertimbangan nilai, sebagaimana ditegaskan Coccossis dan Mexa (2004).

Batas ketiga menyangkut risiko penyalahgunaan. Kerangka yang menuntut pemantauan berlapis dapat berubah menjadi beban administratif yang berat apabila diterapkan tanpa penyederhanaan. Bagi kawasan dengan sumber daya terbatas, lebih baik memantau tiga indikator secara sungguh-sungguh daripada memantau dua puluh indikator di atas kertas.

Batas keempat menyangkut dalil tentang urutan ambang. Dalil bahwa ambang warga tercapai lebih dahulu daripada ambang pengalaman disusun berdasarkan penalaran dan bacaan atas literatur, dan belum diuji melalui pengukuran serentak pada kedua kelompok. Pengujian inilah yang menjadi agenda riset paling mendesak dari artikel ini.

6. KESIMPULAN

Artikel ini berangkat dari kebuntuan yang berulang dalam pembicaraan tentang kunjungan berlebih di kawasan pusaka perkotaan Indonesia, yaitu pencarian angka daya dukung yang

tidak pernah selesai dan tidak pernah dapat ditegakkan. Penjelasan yang diajukan adalah bahwa kebuntuan tersebut bersumber pada bentuk pertanyaannya, bukan pada kurangnya kajian.

Kawasan pusaka perkotaan tidak berpagar, bercampur dengan kehidupan harian kota, mengalami tekanan yang memuncak pada waktu tertentu, dan menanggung jenis kerusakan yang beragam. Keempat ciri tersebut membuat perumusan daya dukung sebagai angka tunggal tidak dapat dijalankan. Sebagai gantinya, artikel ini mengusulkan pengalihan pertanyaan dari jumlah orang yang boleh datang menjadi kondisi yang hendak dipertahankan beserta titik ketika pengelola harus bertindak.

Usulan tersebut dituangkan dalam Kerangka Ambang Berlapis yang membedakan ambang sistem, ambang warga, dan ambang pengalaman, lalu menurunkan menjadi empat ranah indikator, yaitu ranah fisik dan ekologis, ranah ruang dan perilaku, ranah sosial dan kewargaan, serta ranah budaya dan praktik. Dalil utama yang diajukan adalah bahwa pada kawasan pusaka perkotaan ambang warga umumnya tercapai lebih dahulu daripada ambang pengalaman, sehingga pemantauan yang hanya bersandar pada kepuasan wisatawan akan selalu terlambat.

Pembacaan atas kawasan Malioboro dan kawasan wisata Bali menunjukkan bahwa keduanya menghadapi bentuk tekanan yang berbeda dan karena itu menuntut ranah pemantauan yang berbeda pula. Malioboro menuntut perhatian utama pada ranah ruang dan perilaku serta pada penghidupan pelaku usaha kecil di dalamnya. Bali menuntut perhatian utama pada ranah fisik dan ekologis, khususnya air, serta pada ranah budaya dan praktik.

Kesimpulan yang paling penting bagi kebijakan adalah bahwa instrumen apa pun, termasuk kuota maupun pungutan, hanya bermakna apabila dikaitkan dengan kondisi yang hendak dijaga dan disertai kejelasan mengenai siapa yang berwenang bertindak ketika ambang terlampaui. Tanpa keduanya, instrumen akan dinilai dari besarnya penerimaan atau dari ramainya pemberitaan, bukan dari membaiknya keadaan kawasan.

Keterbatasan artikel ini terletak pada sifatnya yang konseptual dan pada penggunaan sumber sekunder sepenuhnya. Karena itu, agenda riset lanjutan yang paling mendesak ada empat. Pertama, pengujian dalil mengenai urutan ambang melalui pengukuran serentak terhadap kepuasan wisatawan dan dukungan warga pada kawasan yang sama. Kedua, penyusunan dan pengujian instrumen pemantauan dukungan warga yang cukup sederhana untuk dijalankan pengelola kawasan secara berkala. Ketiga, penetapan awal standar dan pemicu pada satu kawasan percontohan, disertai penelusuran atas apa yang terjadi ketika pemicu tersebut benar-benar tercapai. Keempat, kajian mengenai kaitan antara instrumen ekonomi dan perubahan kondisi kawasan, agar penilaian atas instrumen semacam pungutan tidak berhenti pada sisi penerimaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-arab, N. K. I., & Abbawi, R. F. N. (2023). Revitalizing urban heritage for tourism development: A case study of Baghdad's old city center. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(9).

Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. *Canadian Geographer*, 24(1), 5–12.

Coccossis, H., & Mexa, A. (Eds.). (2004). *The challenge of tourism carrying capacity assessment: Theory and practice*. Ashgate.

Hidalgo-Giralt, C., Palacios-García, A., Barrado-Timón, D., & Rodríguez-Esteban, J. A. (2021). Urban industrial tourism: Cultural sustainability as a tool for confronting overtourism. Cases of Madrid, Brussels, and Copenhagen. *Sustainability*, 13(9), 4694.

López-Gay, A., Cocola-Gant, A., & Russo, A. P. (2021). Urban tourism and population change: Gentrification in the age of mobilities. *Population, Space and Place*, 27(1), e2380.

Manning, R. E. (2007). *Parks and carrying capacity: Commons without tragedy*. Island Press.

McCool, S. F., & Lime, D. W. (2001). Tourism carrying capacity: Tempting fantasy or useful reality? *Journal of Sustainable Tourism*, 9(5), 372–388.

Nilsson, J. H. (2020). Conceptualizing and contextualizing overtourism: The dynamics of accelerating urban tourism. *International Journal of Tourism Cities*, 6(4), 657–671.

Novy, J., & Colomb, C. (2021). Urban tourism as a source of contention and social mobilisations: A critical review. In C. Milano, J. M. Cheer, & M. Novelli (Eds.), *Travel and tourism in the age of overtourism* (pp. 6–23). Routledge.

Nugroho, W. W., & Putri, A. A. (2025). Strategi pengembangan konsep green tourism pada Kawasan Wisata Malioboro Kota Yogyakarta. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 20(1), 384–401. <https://doi.org/10.20961/region.v20i1.92190>

Page, S. J., & Duignan, M. (2023). Progress in tourism management: Is urban tourism a paradoxical research domain? Progress since 2011 and prospects for the future. *Tourism Management*, 98, 104737.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali.

Pramono, R., Juliana, J., Hulu, M., Djakasaputra, A., & Jie, F. (2026). Overtourism in Bali and Lombok: A governance and community perspective on challenges and strategies for sustainable development. *Societies*, 16(2), 65.

Rahmad, M., Riyadi, A., Rachman, A. F., Muhandiansyah, D., Hastriana, E., Asmaniaty, F., Oktadiana, H., Hutagalung, M. H., Rahmanita, M., Widyastuti, N., Nurbaeti, Oktovianus, Inkadijaya, R., & Rianto. (2025). *Pariwisata perkotaan: Teori, perencanaan, dan implementasi*. Rama Asia Wisata.

Roth, D., & Sedana, G. (2015). Reframing Tri Hita Karana: From "Balinese culture" to politics. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 16(2), 157–175.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.

Stankey, G. H., Cole, D. N., Lucas, R. C., Petersen, M. E., & Frissell, S. S. (1985). *The limits of acceptable change (LAC) system for wilderness planning* (General Technical Report INT-176). USDA Forest Service, Intermountain Forest and Range Experiment Station.

Tan, Q. (2023). Research on sustainable carrying capacity of urban tourism environment based on multi objective optimization algorithm. *Results in Engineering*, 19, 101344.

Torraco, R. J. (2005). Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples. *Human Resource Development Review*, 4(3), 356–367.